



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 6 Nomor 1 Tahun 2026 Page 31-47

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Ketahanan Pangan Melalui Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Siharjulu Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan

Mawar Natal Lumbantoruan¹, R. Sally Marisa Sihombing^{2✉}

Universitas Sumatera Utara

Email: sallymarisa@usu.ac.id^{2✉}

Abstrak

Pertanian merupakan tulang punggung masyarakat pedesaan, ketahanan pangan menjadi perhatian penting dalam pembangunan pedesaan. Menurut Maxwell dan Frankenberger (1992), studi ini mengkaji ketahanan pangan di Desa Siharjulu, Kecamatan Lintongnihuta, dengan menggunakan strategi pemberdayaan kelompok tani. Studi ini berfokus pada indikator ketahanan pangan seperti ketersediaan dan akses pangan serta manfaat langsung dan tidak langsung. Metode kualitatif deskriptif digunakan, dan informasi dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan kepala desa, perangkat desa, serta pimpinan dan anggota kelompok tani. Temuan menunjukkan bahwa organisasi petani telah membantu meningkatkan ketersediaan input pertanian seperti peralatan, pupuk, dan benih. Namun, masih ada kendala berupa tidak adanya regulasi tertulis, lemahnya koordinasi dan pengawasan, keterlambatan distribusi pupuk, serta kurangnya fasilitas penyimpanan dan edukasi gizi. Keterlambatan distribusi pupuk berdampak langsung pada produktivitas pertanian dan pendapatan petani. Dampak tidak langsung berupa perubahan pola pikir petani dan semangat kemandirian mulai tumbuh meski belum merata. Oleh karena itu, diperlukan regulasi desa yang jelas dan sistematis, penguatan kelembagaan kelompok tani, serta perbaikan mekanisme distribusi bantuan pertanian demi mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Kata Kunci : *Ketahanan Pangan, Pemberdayaan, Kelompok Tani, Pupuk Bersubsidi, Kebijakan Desa.*

Abstract

Agriculture is the backbone of rural communities, and food security is a crucial concern in rural development. According to Maxwell and Frankenberger (1992), this study examines food security in Siharjulu Village, Lintongnihuta District, using a farmer group empowerment strategy. The study focuses on food security indicators such as food availability and access, as well as direct and indirect benefits. A descriptive qualitative method was used, and information was collected through observation, interviews, and documentation with village heads, village officials, and farmer group leaders and members. Findings indicate that farmer organizations have helped increase the availability of agricultural inputs such as equipment, fertilizer, and seeds. However, obstacles remain, including the lack of written regulations, weak coordination and oversight, delays in fertilizer distribution, and a lack of storage facilities and nutrition education. Delays in fertilizer distribution directly impact agricultural productivity and farmer incomes. Indirect impacts include changes in farmers' mindsets and a growing sense of independence, although not yet evenly distributed. Therefore, clear and systematic village regulations, strengthening farmer group institutions, and improving agricultural aid distribution mechanisms are needed to support sustainable food security.

Keywords: Food Security, Empowerment, Farmer Groups, Subsidized Fertilizer, Village Policy.

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan merupakan salah satu perhatian utama bagi pembangunan nasional dan internasional. Ketahanan pangan, menurut FAO, tercapai ketika setiap orang memiliki akses terhadap pangan yang sehat dan berkelanjutan. Di Indonesia, sektor pertanian berperan penting sebagai penopang ketahanan pangan dan penggerak ekonomi nasional. Selain menyediakan bahan pangan, sektor ini menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi wilayah (Salasa, 2021). Karena itu, penguatan sektor pertanian menjadi prioritas dalam mewujudkan kemandirian pangan. Tantangan yang dihadapi mencakup produktivitas, distribusi hasil, dan kapasitas petani yang masih rendah, sehingga diperlukan pembinaan dan kelembagaan pertanian yang kuat dan berkelanjutan di tingkat akar rumput.

Pemerintah memiliki peran penting dalam pembinaan kelembagaan petani melalui kebijakan yang berorientasi pada pemberdayaan. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2016 menegaskan pentingnya kegiatan apresiasi, sosialisasi, fasilitasi, pendampingan, dan pelatihan kelembagaan. Regulasi ini menunjukkan bahwa kelompok tani memerlukan dukungan sistematis agar mampu berkembang mandiri. Kelembagaan petani berfungsi sebagai penguat koordinasi antarpetani serta wahana pembelajaran yang mendorong

inovasi dan efisiensi. Pembinaan kelembagaan yang efektif menjadi pondasi untuk menciptakan sistem pertanian berkelanjutan dan meningkatkan kemampuan petani menghadapi dinamika ekonomi dan lingkungan yang terus berubah.

Kelompok tani memegang peran penting dalam pembangunan pertanian berkelanjutan. Peraturan Menteri No. 67/Permentan/SM.050/12/2016 menyatakan bahwa kelompok tani berfungsi sebagai unit produksi, wadah pembelajaran, dan wadah kolaborasi. Melalui kelompok tani, petani dapat mengakses sumber daya, bertukar informasi, dan meningkatkan posisi tawar mereka di pasar (Virianita, Soedewo & Fatchiya, 2019). Keberhasilan kelompok tani sangat bergantung pada penyuluhan, pendampingan, serta dukungan dari pemerintah daerah dan sektor swasta. Dengan manajemen kelompok yang baik, petani dapat lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan iklim, fluktuasi harga, dan tantangan produksi.

Kebijakan publik berperan sebagai instrumen strategis dalam penguatan kelompok tani dan ketahanan pangan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menegaskan pentingnya penyelenggaraan pangan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terpadu untuk menjamin ketersediaan serta akses masyarakat terhadap pangan bergizi. Pemerintah perlu merancang kebijakan yang berpihak pada petani kecil dan menjamin stabilitas pasokan pangan nasional. Dengan demikian, ketahanan pangan tidak hanya mencakup ketersediaan, tetapi juga pemerataan distribusi dan peningkatan kualitas konsumsi masyarakat secara berkelanjutan (Saheb, Slamet & Zuber, 2018).

Visi Badan Pangan Nasional menekankan "Ketahanan Pangan Nasional berbasis kedaulatan dan kemandirian yang tangguh dan berkelanjutan." Visi ini menggambarkan pentingnya kemandirian pangan yang tidak hanya mencukupi kebutuhan kuantitatif, tetapi juga memenuhi standar kualitas dan keberlanjutan lingkungan. Untuk mewujudkannya, misi nasional meliputi penguatan ketersediaan dan cadangan pangan, stabilisasi harga, keamanan pangan, serta peningkatan konsumsi gizi seimbang berbasis potensi lokal. Prinsip gotong royong dan pemberdayaan komunitas menjadi fondasi utama dalam membangun sistem pangan nasional yang tangguh menghadapi tantangan global.

Peran petani di pedesaan menjadi kunci dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Pemerintah daerah berpedoman pada Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 11 Tahun 2022 yang mengatur tugas pembinaan, pengembangan, serta pengawasan sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan ketahanan pangan. Dinas pertanian bertanggung jawab dalam mengoordinasikan ketersediaan, distribusi,

konsumsi, dan keamanan pangan. Keterlibatan aktif petani melalui kelompok tani menjadi strategi penting dalam mengoptimalkan lahan pertanian dan meningkatkan produktivitas. Kebijakan ini mencerminkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat desa.

Data BPS Sumatera Utara (2024) mencatat tenaga kerja di sektor pertanian mencapai 7,59 juta orang, meningkat signifikan dari tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan besarnya potensi dan peran sektor pertanian dalam perekonomian daerah. Namun, peningkatan kuantitas tenaga kerja belum sejalan dengan peningkatan produktivitas. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat, khususnya petani, perlu diperkuat agar mereka mampu mengoptimalkan sumber daya dan meningkatkan pendapatan. Pemberdayaan menjadi sarana peningkatan kapasitas individu dan kelompok untuk mandiri dalam mengelola potensi pertanian yang dimiliki.

Produksi padi Indonesia pada 2020 mencapai 54,65 juta ton dengan luas tanam 10,66 juta hektar. Angka ini menunjukkan dominasi subsektor tanaman pangan sebagai penopang ketahanan pangan nasional. Di Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Humbang Hasundutan, program lumbung pangan dikembangkan dengan fokus pada sektor hortikultura dan tanaman pangan. Program ini berdampak positif terhadap produksi dan kesejahteraan petani. Melalui partisipasi kelompok tani, lahan masyarakat dapat dimanfaatkan secara produktif sehingga mengurangi urbanisasi tenaga kerja ke luar daerah. Penguatan ini menegaskan pentingnya sinergi antara kebijakan daerah dan kapasitas lokal.

Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki luas lahan 251.765,93 hektar dan dikenal sebagai wilayah pertanian potensial (BPS, 2020). Kecamatan Lintongnihuta menjadi salah satu sentra produksi dengan komoditas unggulan seperti kopi, padi, dan jagung. Dengan luas lahan pertanian 3.140 hektar dan produksi mencapai 20,07 ton, potensi pertanian wilayah ini memerlukan pengelolaan yang efisien. Optimalisasi lahan serta peningkatan kapasitas kelompok tani menjadi faktor utama dalam memperkuat ketahanan pangan lokal. Potensi besar ini membutuhkan dukungan kelembagaan dan infrastruktur pertanian yang memadai.

Desa Siharjulu di Kecamatan Lintongnihuta mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Pemerintah desa telah mendorong pembentukan kelompok tani sebagai wadah pemberdayaan. Namun, kondisi ketahanan pangan masyarakat belum stabil karena masih ada warga yang kekurangan asupan gizi. Hal ini menunjukkan lemahnya akses terhadap pangan bergizi dan distribusi yang belum merata. Kekurangan gizi berdampak pada kualitas hidup, terutama bagi anak-anak dan lansia. Untuk itu, kelompok tani berperan

penting dalam meningkatkan ketersediaan pangan lokal melalui program bantuan seperti bibit, pupuk, dan pelatihan pertanian.

Kendala utama dalam pemberdayaan petani di Desa Siharjulu terletak pada distribusi pupuk bersubsidi yang tidak tepat waktu, terutama pupuk NPK untuk padi dan TSP untuk jagung. Keterlambatan distribusi menghambat produksi, menurunkan hasil panen, dan melemahkan daya beli petani. Menurut teori Maxwell dan Frankenberger, kondisi ini mencerminkan lemahnya aspek proses dalam ketahanan pangan, khususnya pada produksi dan akses sumber daya. Dampaknya meluas ke aspek gizi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan sistem distribusi pupuk yang lebih efisien dan transparan.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82 Tahun 2013 menegaskan pentingnya pemberdayaan kelompok tani agar lebih efektif dalam mengelola usaha tani. Meskipun program tersebut telah diterapkan di Desa Siharjulu, implementasinya terhambat oleh mekanisme distribusi pupuk yang belum optimal. Petani kehilangan semangat dan produktivitas akibat ketidaktepatan waktu distribusi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan. Diperlukan pengawasan yang lebih ketat agar distribusi pupuk bersubsidi benar-benar menjangkau petani sesuai kebutuhan musim tanam.

Implementasi Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 11 Tahun 2022 masih menghadapi tantangan, terutama pada koordinasi dan efektivitas distribusi sarana produksi. Ketidakterpaduan antarinstansi menyebabkan program ketahanan pangan tidak berjalan optimal. Evaluasi mekanisme distribusi pupuk menjadi langkah penting untuk memastikan kebijakan daerah mendukung kesejahteraan petani. Permasalahan ini memungkinkan dilakukannya penelitian lebih mendalam terhadap unsur-unsur yang menyebabkan penurunan hasil pertanian akibat distribusi pupuk yang tidak efektif di tingkat desa.

Penelitian terdahulu oleh Sjoraida et al. (2024) dan Aisti et al. (2021) menyoroti pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan ketahanan pangan melalui inovasi seperti hidroponik dan kolaborasi lintas sektor. Aman Sandro Sarumpaet (2024) menekankan peran pemerintah desa dalam mendukung kelompok tani. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum menyoroti persoalan keterlambatan distribusi pupuk bersubsidi sebagai variabel penting dalam produktivitas pertanian. Oleh karena itu, penelitian baru ini mencoba menutup kesenjangan tersebut melalui analisis lebih spesifik di tingkat lokal.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap distribusi pupuk bersubsidi sebagai elemen krusial dalam mewujudkan ketahanan pangan desa. Keterlambatan dan

ketidaktepatan distribusi pupuk terbukti berdampak pada produktivitas, ketersediaan pangan, serta konsumsi rumah tangga. Penelitian ini bertujuan menelaah hubungan antara sistem distribusi pupuk dan pemberdayaan kelompok tani dalam meningkatkan ketahanan pangan di Desa Siharjulu, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan. Temuan ini diharapkan memberikan kontribusi nyata bagi perumusan kebijakan ketahanan pangan yang lebih efektif dan berpihak pada petani kecil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari informan penelitian yang telah dipilih sebelumnya. Creswell (dalam Sulistyawati 2023:27) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai metode yang menyelidiki dan memahami signifikansi suatu fenomena melalui upaya-upaya signifikan, termasuk pertanyaan, prosedur, pengumpulan data tertentu dari partisipan, dan analisis data deskriptif. Lebih lanjut, penelitian kualitatif memiliki keunggulan komparatif dalam hal penciptaan langkah-langkah internal dengan konsepsi yang valid, menurut Bennet & Elman (dalam Sahir, Hafni 2022:41). Berdasarkan pertimbangan profesional, peneliti sampai pada kesimpulan bahwa penelitian kualitatif menggunakan data yang dikumpulkan dari lapangan untuk menggambarkan fenomena yang dihadapi partisipan penelitian. Desa Siharjulu, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki potensi pertanian yang perlu dimaksimalkan dan menunjukkan kreativitas dalam memberdayakan organisasi petani.

Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sugiyono (2015:156) mendefinisikan sumber data sekunder sebagai informasi yang dikumpulkan dari dokumen, laporan, catatan, dan tinjauan pustaka, sedangkan sumber data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari responden melalui wawancara dan observasi lapangan. Tiga pendekatan digunakan untuk memperoleh data: dokumentasi, observasi, dan wawancara. Untuk mengidentifikasi fenomena yang sebenarnya, wawancara terorganisir dengan narasumber yang berkualifikasi dilakukan. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen dan catatan yang relevan untuk mendukung temuan wawancara dan observasi, sedangkan observasi dilakukan dengan mengamati secara dekat kegiatan yang sedang berlangsung. Untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin

tentang topik yang diteliti, informan penelitian dipilih dengan menggunakan kriteria tertentu.

Teknik analisis data deskriptif terdiri dari tiga langkah: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Monleong dalam Sulistyawati dkk., 2023:28). Untuk mencapai hasil yang meyakinkan, reduksi data melibatkan pemilihan data penting yang sejalan dengan tujuan penelitian, penyajian data dalam bentuk tabel atau penjelasan singkat, dan penarikan kesimpulan secara bertahap. Triangulasi sumber dan triangulasi teknis digunakan untuk menilai keabsahan data (Sugiyono, 2015:269). Triangulasi teknis melibatkan perbandingan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan triangulasi sumber melibatkan verifikasi kesesuaian data dari berbagai sumber. Untuk menjamin keakuratan data, peneliti melakukan wawancara tambahan jika ditemukan perbedaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Hukum dan Implementasinya dalam Ketahanan Pangan

Komponen kunci dalam mencapai ketahanan pangan berkelanjutan adalah kerangka hukum. Peraturan Menteri Pertanian No. 67/Permentan/SM.050/12/2016, yang mendukung peraturan nasional seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, menekankan pengelolaan pangan yang terpadu dan berkelanjutan, memperkuat peran kelompok tani sebagai wadah pembelajaran, wadah kolaborasi, dan unit produksi.

Di tingkat daerah, Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 11 Tahun 2022 mengatur tanggung jawab dinas pertanian dalam pembangunan dan pembinaan sektor pertanian serta ketahanan pangan. Namun, implementasi di Desa Siharjulu masih bersifat informal karena belum memiliki regulasi tertulis. Kepala Desa Siharjulu, Bapak Lamparis Lumbantoruan, menjelaskan bahwa aturan biasanya hanya disepakati dalam rapat atau kumpul kelompok tani tanpa dituangkan secara resmi, namun tetap dijalankan bersama masyarakat.

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi formal dan praktik lokal, di mana pelaksanaan program ketahanan pangan lebih mengandalkan kesepakatan sosial berbasis nilai-nilai lokal. Sekretaris Desa Siharjulu, Bapak Tumbur Sihombing, juga menegaskan bahwa kebijakan biasanya dibicarakan dalam rapat tanpa dituangkan dalam dokumen tertulis. Kurangnya regulasi desa menyebabkan lemahnya pengawasan dan mekanisme distribusi pupuk. Anggota kelompok tani, Bapak Nasib Sihombing, mengeluhkan ketidakjelasan mekanisme pelaporan jika terjadi keterlambatan pupuk.

Kondisi ini diperparah dengan ketiadaan dokumen kelembagaan yang sesuai standar pembinaan.

Ketua kelompok tani, Bapak Barli Sihombing, menambahkan bahwa pembagian pupuk sering tidak tertib karena tidak ada mekanisme pengecekan langsung terhadap penerima. Akibatnya, proses distribusi bantuan pertanian sering tidak tepat sasaran dan menghambat efektivitas program ketahanan pangan. Analisis menunjukkan bahwa lemahnya pelaksanaan regulasi dan minimnya pemahaman kelompok tani terhadap prosedur distribusi menyebabkan rendahnya efektivitas kebijakan pangan di desa. Diperlukan penguatan regulasi lokal dan sistem pengawasan transparan agar pelaksanaan program ketahanan pangan dapat berjalan berkelanjutan, sesuai teori Maxwell dan Frankenberger (1992).

Ketimpangan antara regulasi formal dan praktik lokal pemberdayaan kelompok tani melalui upaya peningkatan ketahanan pangan menunjukkan bahwa kerangka hukum seharusnya berfungsi sebagai fondasi keberlanjutan, pemerataan akses, serta pengawasan terhadap program. Namun, di Desa Siharjulu terlihat jurang antara regulasi formal tingkat nasional dan daerah dengan praktik informal desa. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan menegaskan tanggung jawab negara menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan konsumsi pangan yang cukup, aman, bergizi, dan beragam. Peraturan Menteri Pertanian dan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan memberi panduan operasional tentang bantuan sarana produksi, kelompok tani, dan alokasi pupuk bersubsidi.

Berdasarkan temuan penelitian di Desa Siharjulu, regulasi ini belum sepenuhnya diwujudkan dalam bentuk konkret seperti Perdes atau SOP tertulis. Pengambilan keputusan tentang distribusi pupuk, alat, dan jadwal penggunaan alat pertanian dilakukan melalui musyawarah tanpa dasar hukum tertulis. Budaya gotong royong mencerminkan nilai lokal, namun sekaligus menunjukkan lemahnya perlindungan hak petani, transparansi distribusi, dan kejelasan peran. Tanpa sistem tertulis, akuntabilitas menjadi lemah; konflik alat atau pupuk tidak memiliki acuan hukum lokal. Meski pendekatan informal memberi fleksibilitas, integrasi regulasi formal dengan nilai lokal tetap dibutuhkan melalui Perdes berbasis partisipasi agar pemberdayaan menjadi bagian dari sistem ketahanan pangan berkelanjutan.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Siharjulu yang menyatakan tidak adanya regulasi khusus di tingkat desa mengenai ketahanan pangan maupun pemberdayaan kelompok tani. Kebijakan yang digunakan masih bersumber dari nasional dan kabupaten seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dan Peraturan

Bupati Humbang Hasundutan No. 11 Tahun 2022. Ketidakhadiran aturan tertulis membuat pelaksanaan program pertanian dilakukan secara informal, informasi disampaikan secara lisan melalui musyawarah, tanpa prosedur formal yang menjamin akuntabilitas kelembagaan desa.

Peran Kelompok Tani dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan

Kelompok tani berperan strategis dalam menjaga ketahanan pangan rumah tangga petani. Selain sebagai pelaku produksi, kelompok tani berfungsi sebagai fasilitator peningkatan kapasitas, penyedia sarana, dan mitra pemerintah desa. Pemerintah Desa Siharjulu secara aktif melaksanakan pelatihan bersama Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) empat kali setahun untuk meningkatkan keterampilan petani. Pelatihan tersebut meningkatkan kemampuan petani dalam menghadapi perubahan iklim dan kondisi lahan yang tidak stabil, sehingga produktivitas dan stabilitas pangan meningkat. Kepala Desa Siharjulu, Bapak Lamparis Lumbantoruan, menyampaikan bahwa pemerintah desa juga menyediakan alat pertanian modern seperti multivator, pompa air, dan jetor untuk mendukung efisiensi pengolahan lahan.

Ketua kelompok tani, Bapak Barli Sihombing, menguatkan bahwa alat-alat tersebut membantu mempercepat pekerjaan di sawah dan menekan biaya produksi. Penggunaan alat secara bergilir menunjukkan adanya koordinasi internal yang baik dalam kelompok tani, memperkuat indikator proses ketahanan pangan menurut Maxwell dan Frankenberger (1992), terutama pada aspek ketersediaan dan akses terhadap sarana produksi. Dengan pengelolaan kolektif dan distribusi yang adil, rumah tangga petani dapat menjaga stabilitas produksi pangan. Hal ini memperlihatkan bahwa peran kelompok tani tidak hanya ekonomi, tetapi juga sosial dalam menjaga keadilan distribusi sumber daya pertanian dan memperkuat ketahanan pangan secara berkelanjutan.

Kelompok tani di Desa Siharjulu memiliki peran penting dalam membangun ketahanan pangan lokal. Mereka bukan sekadar pelaksana teknis atau penerima bantuan, tetapi aktor kunci dalam mendukung ketersediaan, akses, dan stabilitas pangan bagi anggota serta masyarakat desa. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kelompok tani berfungsi sebagai ruang belajar bersama untuk mengelola sumber daya pertanian, meningkatkan produksi, dan mengembangkan strategi pemasaran hasil panen agar petani memperoleh nilai jual lebih baik, sesuai teori ketahanan pangan Maxwell & Frankenberger (1992).

Pemberdayaan kelompok tani terlihat melalui tiga aspek utama: pertama, transfer pengetahuan melalui pelatihan dan bimbingan dari pemerintah desa serta PPL; kedua, penyediaan sarana produksi seperti traktor, pompa air, dan jetor yang memperkuat kapasitas produksi; ketiga, kemandirian pengelolaan dalam menentukan jadwal penggunaan alat dan penyelesaian konflik internal. Ketiga aspek ini memperkuat dimensi akses dan stabilitas pangan karena produksi menjadi efisien dan berkelanjutan. Namun, kelompok tani masih menghadapi tantangan kelembagaan berupa lemahnya struktur organisasi dan dokumentasi kegiatan. Hal ini membatasi akses mereka terhadap program lebih besar. Dalam perspektif Maxwell & Frankenberger, kelompok tani menjadi jembatan antara kebijakan makro dan realitas mikro, tidak hanya berperan dalam produksi pangan, tetapi juga dalam adaptasi sosial terhadap perubahan iklim dan ekonomi.

Ketersediaan dan Aksesibilitas Pangan

Ketahanan pangan rumah tangga sangat bergantung pada dua dimensi utama: ketersediaan dan aksesibilitas pangan. Meskipun Desa Siharjulu memiliki potensi pertanian, tidak semua rumah tangga mampu memenuhi kebutuhan pangannya. Salah satu anggota kelompok tani, Bapak Jappis Sinambela, mengungkapkan bahwa keterbatasan pendapatan dan jumlah tanggungan menyebabkan kebutuhan makan keluarga belum terpenuhi. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa ketersediaan pangan di tingkat desa tidak otomatis menjamin kecukupan pangan rumah tangga. Faktor ekonomi menjadi penentu utama aksesibilitas pangan. Seorang informan menyatakan bahwa penyuluhan gizi tidak banyak membantu tanpa kemampuan ekonomi untuk membeli bahan pangan bergizi.

Ketersediaan pangan di desa juga dipengaruhi oleh penggunaan teknologi pertanian. Pemerintah desa memfasilitasi alat seperti multivator dan pompa air yang meningkatkan hasil panen, sehingga memperkuat akses pangan petani melalui peningkatan pendapatan. Hubungan antara teknologi pertanian dan akses pangan menunjukkan bahwa peningkatan produksi tidak hanya meningkatkan ketersediaan, tetapi juga akses ekonomi masyarakat. Namun, keterbatasan infrastruktur transportasi masih menjadi hambatan dalam distribusi hasil tani. Sekretaris Desa Siharjulu, Bapak Tumbur Sihombing, menjelaskan bahwa keluarga yang kesulitan pangan biasanya didata dan dimasukkan ke program bantuan atau diarahkan bergabung dalam kelompok tani. Selain itu, perhatian terhadap kelompok rentan seperti lansia juga menjadi bagian dari strategi ketahanan pangan. Ketua kelompok tani,

Bapak Barli Sihombing, menyebutkan bahwa bantuan makanan bergizi diberikan secara tidak rutin kepada lansia, meski belum ada program khusus.

Hal ini memperlihatkan bahwa intervensi sosial dalam ketahanan pangan masih bersifat sporadis. Menurut Maxwell dan Frankenberger (1992), ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada ketersediaan, tetapi juga akses masyarakat terhadap makanan bergizi, yang dalam konteks Desa Siharjulu masih belum merata. Pemberdayaan kelompok tani di Desa Siharjulu berdampak pada meningkatnya ketersediaan pangan lokal. Bantuan alat modern, bibit unggul, dan pupuk bersubsidi mendorong peningkatan produksi komoditas seperti kentang, cabai, dan bawang. Namun, peningkatan produksi belum menjamin pemerataan akses pangan. Ketimpangan masih dialami kelompok tanpa lahan, lansia, dan petani gurem. Meski ada bantuan sosial, akses ekonomi dan sosial tetap menjadi kendala. Akses pangan mencakup jarak, jaringan sosial, dan relasi kekuasaan dalam kelompok; sehingga pangan tersedia tetapi tidak selalu dapat dimanfaatkan secara adil oleh semua warga.

Menurut Maxwell & Frankenberger (1992), ketahanan pangan bersifat sistemik. Ketersediaan dan akses harus dibangun bersama melalui kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan. Dari hasil perbandingan indikator teori dengan kondisi lapangan, terlihat kemajuan signifikan pada dimensi ketersediaan pangan. Namun, akses pangan masih menjadi tantangan utama. Ketahanan pangan di Desa Siharjulu bersifat parsial kuat dalam produksi tetapi belum inklusif dalam distribusi. Oleh karena itu, langkah perbaikan yang perlu dilakukan meliputi: peningkatan pendataan kelompok rentan, transparansi distribusi hasil panen, pemberdayaan rumah tangga non-petani melalui program kebun rumah tangga, serta penyusunan regulasi desa tentang ketahanan pangan.

Dengan demikian, ketahanan pangan di Desa Siharjulu masih dalam tahap berkembang. Dimensi ketersediaan menunjukkan kemajuan, namun akses belum merata, terutama bagi kelompok rentan. Ketahanan pangan harus mencakup kemampuan masyarakat memperoleh dan memanfaatkan pangan secara adil dan berkelanjutan, agar tidak hanya kuat dalam produksi, tetapi juga dalam pemerataan akses.

Dampak Langsung dan Tidak Langsung

Dampak langsung kegiatan kelompok tani terlihat pada peningkatan produksi pertanian berkat penggunaan alat seperti multivator, traktor, dan jetor. Mekanisme pemakaian alat secara bergilir membantu semua anggota, sehingga pengolahan lahan

menjadi lebih cepat dan hasil panen meningkat. Selain itu, perhatian terhadap lansia melalui pemberian makanan tambahan seperti susu dan buah-buahan menunjukkan adanya kepedulian sosial. Hal ini membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak hanya mencakup ketersediaan hasil panen, tetapi juga pemenuhan gizi kelompok rentan sesuai indikator dampak langsung Maxwell dan Frankenberger (1992).

Dampak tidak langsung dari kelompok tani terlihat dari perubahan pola pikir dan kebiasaan petani. Mereka lebih terbuka terhadap penggunaan teknologi pertanian dan manajemen sumber daya yang efisien. Bapak Jonta Lumbantoruan menyatakan bahwa melalui kelompok tani, petani mendapat akses pupuk bersubsidi, bibit, dan alat yang lebih murah. Perubahan ini menumbuhkan kemandirian dan menurunkan biaya produksi, sehingga petani dapat mempertahankan produktivitas meskipun kondisi ekonomi sulit. Anggota lain, Bapak Jappis Sinambela, menegaskan bahwa alat seperti jetor dan alat semprot membantu meningkatkan efisiensi kerja di ladang.

Dampak tidak langsung lainnya tampak dari kebiasaan menyimpan hasil panen secara mandiri di rumah, meskipun belum ada fasilitas penyimpanan resmi desa. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran baru untuk mengelola stok pangan sebagai bentuk antisipasi ketika hasil panen menurun. Dengan demikian, kegiatan kelompok tani di Desa Siharjulu tidak hanya meningkatkan hasil pertanian, tetapi juga membentuk pola kemandirian dan kesadaran pangan jangka panjang yang memperkuat ketahanan pangan rumah tangga secara berkelanjutan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa bantuan alat seperti traktor dan pompa air memberikan dampak langsung pada efisiensi kerja petani, menurunkan biaya produksi, serta meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup. Petani lebih cepat menyelesaikan proses tanam-panen dan mampu mengatur pola tanam, menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak hanya pemberian bantuan tetapi juga ruang untuk mengatur sistem produksi. Dampak tidak langsung terlihat dari meningkatnya kesadaran manajemen pasca panen. Petani mulai menyimpan hasil panen secara mandiri, berdiskusi tentang harga pasar dan pupuk, serta menunjukkan solidaritas sosial tinggi. Alat digunakan bergilir tanpa konflik besar, menunjukkan terbentuknya modal sosial penting bagi ketahanan pangan jangka panjang.

Berdasarkan indikator dampak langsung dan tidak langsung, sebagian rumah tangga petani aktif telah mampu memenuhi kebutuhan pangan harian dari hasil panen sendiri. Namun, rumah tangga tanpa lahan dan keluarga miskin masih menghadapi keterbatasan

konsumsi dan gizi. Pola makan mereka monoton, dan belum ada intervensi gizi desa. Sementara itu, kelompok tani yang diberdayakan menunjukkan stabilitas ekonomi lebih baik karena hasil panen bisa dijual. Namun, rumah tangga di luar kelompok tani tetap rentan terhadap fluktuasi harga dan gagal panen. Tidak ada sistem penyimpanan pangan atau asuransi pertanian, membuat ketahanan jangka panjang masih lemah.

Kesimpulannya, Desa Siharjulu mengalami kemajuan dalam aspek produksi dan konsumsi bagi petani, tetapi ketahanan pangan belum merata. Upaya peningkatan ketahanan pangan perlu diarahkan pada strategi jangka panjang seperti pembangunan cadangan pangan desa, edukasi gizi, dan perlindungan petani kecil. Ketahanan pangan yang tangguh memerlukan keseimbangan antara produksi, pemerataan akses, dan keberlanjutan sosial ekonomi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ketahanan pangan di Desa Siharjulu masih belum menyeluruh. Meskipun terdapat peningkatan signifikan dalam hal ketersediaan pangan melalui bantuan alat, pupuk subsidi, dan bibit unggul yang meningkatkan produksi hasil pertanian, capaian tersebut belum diimbangi dengan pemerataan akses pangan bagi seluruh masyarakat desa. Kelompok rentan seperti lansia, buruh tani, rumah tangga tanpa lahan, dan warga yang tidak tergabung dalam kelompok tani masih menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh pangan yang layak dan bergizi. Ketahanan pangan di desa ini masih bersifat lemah dalam aspek distribusi, aksesibilitas, serta perlindungan jangka panjang.

Selain itu, kerangka hukum sebagai fondasi penting dalam mengatur dan mengawasi program ketahanan pangan belum sepenuhnya hadir dalam bentuk kebijakan di tingkat desa. Tidak adanya Peraturan Desa (Perdes) atau prosedur tertulis menyebabkan pelaksanaan program berlangsung secara informal, bergantung pada musyawarah dan kebiasaan lisan, yang pada akhirnya berdampak pada lemahnya akuntabilitas dan perlindungan hak petani. Di sisi lain, peran kelompok tani sudah cukup terlihat dalam mendukung ketahanan pangan melalui pengetahuan, pengelolaan sarana produksi, serta solidaritas sosial. Namun, kapasitas kelembagaan kelompok tani juga perlu diperkuat agar mereka benar-benar mampu menjadi aktor strategis dalam membangun ketahanan pangan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afidah, N. N. (2020). Kampung keluarga berencana sebagai upaya mengubah paradigma mitos banyak anak banyak rezeki. In *Prosiding Seminar Nasional Bahasa*.
Aktivasi Program Ketahanan Pangan Pada Masyarakat Desa Cilembu
- Al Azis, M. V. N. (2022). Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani di Desa Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 7(1), 23-31. (DATA).
- Aldaffa, D. (2023). *Pemberdayaan Kelompok Tani Hortikultura Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Keluarga Di Desa Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Ali, K., & Saputra, A. (2020). Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar. *Warta Dharmawangsa*, 14(4), 602-614. (pemerintah desa).
- Astiti, I. A. P., Winarno, J., & Rusdiyana, E. (2021). Pemberdayaan Kelompok Tani dalam Upaya Peningkatan Ketahanan Pangan. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 17(3), 11-22.
- Dekasari, D. A. (2016). Pemberdayaan Petani dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan di Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 5(1).
- Febriyanti, M. (2024). Pemberdayaan Kelompok Tani (Studi Kasus Pada Kelompok Tani Embung Bengawan Di Kelurahan Juata Kerikil Kecamatan Tarakan Utara)
- Firdausijah, R. T., Alaslan, A., Mustanir, A., Abdurohim, A., Sunariyanto, S., Fauzan, R., ... & Amane, A. P. O. (2023). Manajemen Sektor Publik.
- Hakim, L., Sucipto, T., Iswanto, A. H., Sutiawan, J., Hartono, R., Manurung, H., ... & Rangkut, A. B. (2022). Integrasi Agroforestri dan Sistem Budidaya Lebah Madu (*Trigona* Sp.) dalam Penguatan Food Estate di Humbang Hasundutan. *Repong Damar: Jurnal Pengabdian Kehutanan dan Lingkungan*, 1(1).
- Hanafie, R. (2010). Penyediaan pangan yang aman dan berkelanjutan guna mendukung tercapainya ketahanan pangan. *JSEP (Journal of Social and Agricultural Economics)*, 4(3), 38-43.
- Januar, M., & Sumardjo, S. (2010). Peran Kelompok Tani Dalam Ketahanan Pangan Rumah tangga Petani (Desa Banjarsari dan Desa Tanjungsari, Kecamatan Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat). *Jurnal Penyuluhan*, 6(2).
Kabupaten Sumedang. *PROFICIO*, 5(1), 57-63.

- Kurniawan, N. (2023). Analisis Dampak Perubahan Iklim terhadap Sektor Pertanian. *literacy notes*, 1(2).
- Lermating, K. F., Aidore, H. J. Y., & Paiki, F. D. (2024). Ketersediaan Dan Aksesibilitas Pangan Lokal: Implikasinya Terhadap Ketahanan Pangan Di Distrik Konda Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya. *Jurnal Administrasi Terapan*, 3(1), 102-110.
- Machmur, M. 2010. "Optimalisasi Pekarangan Percepat Penganekaragaman Pangan." *Tabloid Sinar Tani*, Edisi 18-2(3368).
- Malindir, G. O., & Mashud, A. B. (2022). Pemberdayaan Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Hasil Pertanian Di Desa Arjasari Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 15(2), 39- 55.
- Manikas, I., Ali, B. M., & Sundarakani, B. (2023). A systematic literature review of indicators measuring food security. *Agriculture & food security*, 12(1), 10. Mardikanto, T., & Soebianto, P. (2012). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Alfabeta.
- Morse, R. S. dan J. B. Stephens. 2012. Teaching Collaborative Governance: Phases, Competencies, and Case-Based Learning. *Journal of Public Affairs Education*. 18(3):565-567)
- Mutiawati, T., & Sudarmo, S. (2021). Collaborative governance dalam penanganan rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 1(1), 82-98.
- Ndraha, T. (1987). *Pembangunan masyarakat: mempersiapkan masyarakat tinggal landas*. Bina Aksara.
- Nippi, A. T. (2019). Strategi Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Kelompok Tani. *Meraja journal*, 2(1).
- Nur, A. C., & Guntur, M. (2019). Analisis Kebijakan Publik. *Makassar: Publisher UNM*.
- Pujiati, S., Pertiwi, A., Silfia, C. C., Ibrahim, D. M., & Hafida, S. H. N. (2020). Analisis ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan dalam mendukung tercapainya ketahanan pangan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 16(2).
- Purba, F. (2023). Peranan Kelompok Tani terhadap Peningkatan Produksi Bawang Merah di Desa Simamora Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan.
- Raintung, A., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *Governance*, 1(2).

- Safitri, D. A., & Murialti, N. (2025). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketahanan Pangan antar Wilayah di Provinsi Riau. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(1), 5110-5118.
- Saheb, S., Slamet, Y., & Zuber, A. (2018). Peranan modal sosial bagi petani miskin untuk mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga di pedesaan Ngawi (studi kasus di Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Analisa Sosiologi*, 2(1).
- Sahir, Syafrida Hafni. (2022). *Metodologi Penelitian*. Medan: Penerbit KBM Indonesia.
- Salasa, Andi Rachman. "Paradigma dan dimensi strategi ketahanan pangan Indonesia." *Jejaring Administrasi Publik* 13.1 (2021): 35-48.
- Saliem, H. P., & Ariani, M. (2002). Ketahanan pangan, konsep, pengukuran dan strategi. In *Forum Penelitian Agro Ekonomi* (Vol. 20, No. 1, pp. 12-24).
- Saputra, I. P. Y. A. (2021). Analisis Pemasaran Padi, Harga Pokok Penjualan Beras, Dan Nilai Tambah Padi Menjadi Beras Di Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung.
- Sari, Y. P. (2021). *Inovasi Pelayanan Sektor Publik Di Mall Pelayanan Publik Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Sarumpaet, A. S. (2024). *Peranan Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Pakkat Huagong Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Satibi, I. (2023). Manajemen Publik Dalam Perspektif Teoritik dan Empirik. Sjoraida, D. F., Nugraha, A. R., Wiyatna, M. F., Bakti, I., & Setianti, Y. (2024).
- Sudianing, N. K., & Sandiasa, G. (2020). Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Program Inovasi Desa (Di Desa Uma Anyar Dan Desa Tejakula). *Locus Majalah Ilmiah FISIP UNIPAS*, 12(2), 1-16.
- Suharto, Edi. (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Sukino. (2020). *Membangun Pertanian Dengan Pemberdayaan Masyarakat Tani. Terobosan Menanggulangi Kemiskinan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- SYAHRUL M, S. M. (2024). *Peranan Kelompok Tani Terhadap Peningkatan Ekonomi Petani Bawang Merah Di Desa Pamboborang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene* (Doctoral dissertation, Universitas Sulawesi Barat).
- Umiyati, H., Anwar, K., Amane, A. P. O., Sipayung, B., Hutasoit, W. L., Rijal, K. & Sudarmanto, E. (2023). *Tata Kelola Sektor Publik*.

- Virianita, R., Soedewo, T., Amanah, S., & Fatchiya, A. (2019). Persepsi petani terhadap dukungan pemerintah dalam penerapan sistem pertanian berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 24(2), 168-177.
- Wahyudi, J. (2023). Pemerintahan Desa Pasca UU Desa: Mewujudkan Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Inovasi Desa. *Jurnal Reinventing*, 5(1), 1-15.
- Wance, M., Kaliky, P. I., & Syahidah, U. (2021). Pkm Inovasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Pasir Putih Kabupaten Halmahera Selatan. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 3(2), 233-240.
- Wicaksono, K. W. (2018). Tipologi Inovasi Sektor Publik Pada Tiga Program Inovatif Pemerintah Daerah Kota Surabaya (Tinjauan Reflektif Terhadap Tiga Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2018).
- Widodo, J. (2007). Analisis Kebijakan Publik, Bayumedia. *Publishing, Malang*. Wijaya, A. F., & Danar, O. R. (2014). *Manajemen Publik: Teori dan Praktik*. Universitas Brawijaya Press.
- Winarti, P. (2022). *Implementasi Prinsip Tata Kelola Organisasi pada BUMDes Estu Mukti Ambarawa* (Doctoral dissertation).
- Zamrodah, Y. (2020). Penyusunan Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis*, 20(2).